

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL (Studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2009-2013)

THE EFFECT ON REGIONAL INCOME TO THE CAPITAL EXPENDITURES (Case study at the Department of Finance and Asset Management of Bandung City in 2009-2013)

Lura Mustika Putteri¹, Leny Suzan, S.E., M.Si²

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

²Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹luramustikaputteri@gmail.com, ²lenysuzan@yahoo.com

Abstrak

Pendapatan asli daerah yang meningkat diduga tidak serta merta akan meningkatkan belanja modal. Efisiensi PAD dapat dikatakan berhasil jika realisasi pendapatan asli daerahnya melebihi target anggaran yang ditetapkan. Namun semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi maka presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan verifikatif. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* jenuh dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung tahun 2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil dari penelitian ini adalah PAD secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Modal.

Abstract

Increased regional income that allegedly not necessarily to increase capital expenditures. PAD efficiency can be said to be successful if the realization of regional income exceeded the budget targets set. However, the higher percentage of funds allocated to the operating expenditure percentage of capital expenditure (development) which is used to provide the economic infrastructure of society tend to be smaller. The purpose of this research is to analyze the effect of the original regional income (PAD) on Capital Expenditure. This research is a descriptive and verification research. The sampling technique used is saturation sampling using Bandung City's Realization Budget Report in 2009-2013 as populations. The data used in this research is secondary data. The analytical method used is descriptive statistics, hypothesis testing and multiple linear regression model with the classical assumption of normality test, heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation. The result of this research shows that simultaneously PAD has significant effect on Capital Expenditure. While in partial, Regional Tax, Regional Retribution don't have any significant effect on Capital Expenditure and other legitimate Regional Income have any significant effect on Capital Expenditure.

Keywords: Regional Income (PAD), Regional Taxes, Regional Retribution, other legitimate Regional Income, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mamaesah dalam Halim dan Kusufi (2012:21), berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pendapatan daerah berbasis kas (pendapatan-LRA) adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012:106). Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah itu sendiri terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim dan Kusufi, 2012:101).

Retribusi daerah terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat potong hewan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah (Halim dan Kusufi, 2012:102).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, dan sebagainya (Halim dan Kusufi, 2012:104).

Pengertian belanja dalam PSAP BA 02 paragraf 07 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Salah satu belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah belanja modal. Yang dimaksud belanja modal dalam PSAP BA 02 paragraf 37 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Pemerintah Kota Bandung lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi maka presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:235). Pemerintah daerah Kota Bandung perlu menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung walaupun patokan untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningkatkan belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan Asli Daerah

Halim dan Kusufi (2012:101) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis

pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Rachmat (2011:267), pajak didefinisikan sebagai pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Retribusi Daerah

Menurut Rachmat (2011:267), retribusi didefinisikan sebagai suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah yang di dalamnya kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim dan Kusufi, 2012:104).

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2012:104).

Belanja Modal

Dalam PSAP BA 02 paragraf 37 dijelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pajak Daerah dan Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Sulistyowati (2011) dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Semakin besar pajak yang diterima oleh daerah maka, semakin besar pula PAD. Hal tersebut menyebabkan semakin besarnya pula pengalokasian untuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Nuraina (2012) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Retribusi Daerah dan Belanja Modal

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulistyowati (2011). Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas (Adi, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Belanja Modal

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, komponen pendapatan asli daerah lainnya meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi yang signifikan agar dapat membantu Pemerintah Daerah meningkatkan hasil pendapatan daerahnya. Semakin tingginya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (APBD) Pemerintah Daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Belanja Modal

Lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang signifikan agar dapat membantu Pemerintah Daerah meningkatkan hasil pendapatan daerahnya. Semakin tingginya lain-lain PAD yang sah maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. Lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (APBD) Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian metode deskriptif dan metode verifikatif Menurut Sekaran (2011:158) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Sedangkan penelitian verifikatif menurut Arikunto (2010:28) pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

Variabel Operasioanal

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran, 2011:117). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) dan Lain-Lain PAD yang Sah (X4).

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2011:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.

Populasi dan Sampel

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada periode 2009-2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada periode 2009-2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2012.

Teknik Analisis Data

Statistika Deskriptif

Untuk dapat mengetahui tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan Belanja Modal dilakukan pengujian Statistik Deskriptif. Menurut Musfiqon (2012:170) statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melihat aspek rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Menurut Jogiyanto (2004) dalam Sunjoyo (2013:24) Mean adalah rata-rata hitung dari suatu data. Biasanya mean digunakan untuk menghitung rata-rata dari data kuantitatif (interval atau rasio). Standar deviasi adalah ukuran dispersi sekitar rata-rata. Bila standar deviasi dikuadratkan maka didapat varian. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari suatu data. Nilai minimum adalah nilai terendah dari suatu data.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier, data terlebih dahulu diuji layak untuk digunakan atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedestisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2013:110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 20,0. Bentuk persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Belanja Modal
A	= Konstanta
β_1 - β_3	= Koefisien regresi dari setiap variabel independen
X1	= Pajak Daerah
X2	= Retribusi Daerah
X3	= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
X4	= Lain-lain PAD yang Sah
e	= Error

Pegujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, maka perlu digunakan analisa melalui uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2013 : 97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota Bandung secara simultan.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal pada Kota Bandung secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan Belanja Modal Kota Bandung selama periode 2009 sampai dengan 2013 yang dilakukan breakdown secara perbulan menjadi dua belas bulan per tahun:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak daerah	60	11.410.157.122	215.316.750.378	53.897.976.177,78	36.104.606.209,65
retribusi daerah	60	3.776.451.031	15.009.968.636	7.020.450.866,75	2.564.538.413,67
lain_lain PAD yang sah	60	1.563.838.271	41.864.791.164	6.274.382.301,99	5.721.578.327,58
belanja modal	60	0	501.976.282.518	54.671.336.026,6	83.728.744.070,9
Valid N (listwise)	60				

a. Deskripsi Pajak Daerah (X1)

Pajak Daerah terkecil (Minimum) adalah sebesar Rp 11.410.157.122 yang merupakan pajak daerah pada bulan Maret tahun 2009, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. Pendapatan Pajak Daerah terbesar (Maximum) adalah Rp 215.316.750.378 yang merupakan pajak daerah pada bulan September tahun 2013, yaitu periode akhir pengamatan penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pajak daerah dari awal tahun bulan Januari hingga akhir tahun Desember tahun 2009-2013 sebesar 1787,06%.

b. Deskripsi Retribusi Daerah (X2).

Retribusi Daerah terkecil (Minimum) adalah sebesar Rp 3.776.451.031 yang merupakan retribusi daerah pada bulan April tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah terbesar (Maximum) adalah Rp 15.009.968.636 yang merupakan retribusi daerah pada bulan Oktober tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan retribusi daerah dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar 297,46%.

c. Deskripsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3).

Di dalam penelitian ini penulis menghilangkan variabel independen hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (X3) dikarenakan data yang tersedia tidak lengkap sehingga penulis tidak dapat melakukan uji statistik dan memberikan deskripsi secara mendetail mengenai variabel tersebut.

d. Deskripsi Lain-Lain PAD yang Sah (X4).

Lain-lain PAD yang sah terkecil (Minimum) adalah sebesar Rp 1.563.838.271 yang merupakan lain-lain PAD yang sah pada bulan Juli tahun 2010. Lain-lain PAD yang sah (Maximum) adalah Rp 41.864.791.164 yang merupakan lain-lain PAD yang sah pada bulan Desember tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar 2577,05%.

e. Deskripsi Belanja Modal

Belanja Modal Kota Bandung terkecil (Minimum) adalah sebesar Rp 0, yang menandakan bahwa tidak adanya belanja modal di dua bulan pertama yaitu bulan Januari dan Februari pada tahun 2009-2013. Belanja modal (Maximum) adalah Rp 501.976.282.518 yang merupakan belanja modal pada bulan Desember tahun 2012. Persentase kenaikan belanja modal tidak dapat diketahui karena belanja modal memiliki belanja terkecil di bulan Januari-Februari sebesar Rp 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan belanja modal di bulan tersebut. Namun, jika dilihat dari data LRA menunjukkan bahwa belanja modal Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Tabel 2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001719
	Std. Deviation	71,864,857,683.57056000
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.173
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data yang digunakan didalam uji normalitas ini ialah data yang menghilangkan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) karena jika data tersebut dimasukkan ke dalam regresi, maka data yang diperoleh tidak normal. Maka dari itu, penulis hanya memakai data dengan tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Uji normalitas menggunakan uji statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang melihat nilai signifikansi normalitas residual. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,344 dan signifikansinya pada 0,054. Nilai signifikansi diatas $\alpha = 0,05$. Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Uji Multikolinearitas dengan Matrik Korelasi
Coefficient Correlations^a

Model		In_lain lain PAD yang sah	retribusi daerah	pajak daerah
Correlations	In_lain lain PAD yang sah	1.000	-.003	-.760
	retribusi daerah	-.003	1.000	-.259
	pajak daerah	-.760	-.259	1.000
	In_lain lain PAD yang sah	624,562,550,855,872,00 0,000.000	-211,031,334.301	8,485,157,814.84
Covariances	retribusi daerah	-277,057,354.51	16.710	-.472
	pajak daerah	-8,485,157,814.84	-.472	.200

a. Dependent Variable: belanja modal

Uji Multikolinearitas menggunakan matrik korelasi dan perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Dapat dilihat hasil besaran antar variabel independen tampak bahwa korelasi antara variabel Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar -0,760 atau sekitar 76%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas dengan Nilai *Tolerance* dan VIF
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-934,414,195,214.03	540,624,072,609.78		-1.728	.089		
pajak daerah	.564	.447	.243	1.262	.212	.354	2.821
retribusi daerah	-2.742	4.088	-.084	-.671	.505	.839	1.192
ln_lain lain PAD yang sah	43,778,502,221.45	24,991,249,485.69	.326	1.752	.085	.380	2.632

a. Dependent Variable: belanja modal

Dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-557,442,013,718.12	309,874,172,894.33		-1.799	.077
ln_pajak daerah	23,520,499,006.06	13,522,697,821.11	.306	1.739	.087
retribusi daerah	-.338	2.699	-.016	-.125	.901
sqrt_lain lain PAD yang sah	370,376.53	346,533.85	.183	1.069	.290

a. Dependent Variable: AbsUt

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Hasil perhitungan uji Glejser menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini karena nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.530 ^a	.281	.242	124,329.72	1.668

a. Predictors: (Constant), sqrt_lain lain PAD yang sah@, sqrt_retribusi daerah@, sqrt_pajak daerah@

b. Dependent Variable: sqrt_belanja modal@

Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil perhitungan uji Durbin-Watson menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,668. Nilai du untuk jumlah sampel 60 dengan tiga variabel 1,689 dan nilai dl sebesar 1,480. Hal menunjukkan bahwa nilai D-W lebih besar dari nilai dl dan lebih kecil dari nilai du. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif dengan keputusan *no decision*.

Model Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 20,0. Berikut ini adalah hasil pengujian:

Tabel 7 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	1.516.610.654	27.180.414.116		.056	.956
pajak daerah	.474	.360	.204	1.315	.194
retribusi daerah	-1.719	3.916	-.053	-.439	.662
lain_lain PAD yang sah	6.325	2.128	.432	2.973	.004

a. Dependent Variable: belanja modal

Berdasarkan hasil tersebut maka disusunlah model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.516.610.654 + 0,474 X_1 - 1,719 X_2 + 6,325 X_3 + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 1.516.610.654 artinya apabila diasumsikan nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah bernilai nol, maka Belanja Modal sebesar 1.516.610.654.
2. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien 0,474, artinya setiap pertambahan 1% Pajak Daerah maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,474 %.
3. Variabel Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien 6,325, artinya setiap pertambahan 1% Lain-Lain PAD yang Sah maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 6,325 %.

Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis:

Tabel 8 Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.293	70.406.674.642

a. Predictors: (Constant), lain_lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, pajak daerah

b. Dependent Variable: belanja modal

Dari tampilan Tabel 4.8 menunjukkan besarnya *adjusted R²* adalah 0,293, hal ini berarti 29,3% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan sisanya (100% - 29,3% = 70,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Tabel 9 Uji Statistik F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	136.127.618.433.297.070.000.000	3	45.375.872.811.099.025.000.000	9.154	.000 ^b
Residual	277.597.590.710.697.860.000.000	56	4.957.099.834.119.604.000.000		
Total	413.725.209.143.994.950.000.000	59			

a. Dependent Variable: belanja modal

b. Predictors: (Constant), lain_lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, pajak daerah

Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel 4.9 didapat nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh di bawah taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Tabel 10 Uji Statistik t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.516.610.654	27.180.414.116		.056	.956
pajak daerah	.474	.360	.204	1.315	.194
retribusi daerah	-1.719	3.916	-.053	-.439	.662
lain_lain pendapatan asli daerah yang sah	6.325	2.128	.432	2.973	.004

a. Dependent Variable: belanja modal

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk masing-masing adalah sebesar 0,194 dan 0,662, yang jauh di atas taraf signifikansi 0,05. Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas adalah sebesar 0,004 yang jauh di bawah taraf signifikansi 0,05.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal secara Simultan

Berdasarkan uji koefisien determinasi didapatkan nilai *Adjusted R square* 0,293. Artinya 29,3% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hasil ini menunjukkan hasil yang relatif kecil, yang berarti nilai sisanya yaitu 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dari Tabel 4.9 adalah nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh di bawah taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Maka dapat dikatakan secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hal ini berarti PAD memiliki pengaruh yang besar terhadap Belanja Modal, terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000. Semakin besar PAD maka Belanja Modal akan semakin besar pula. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oluwatobi dan Ogunrinola (2011), Wertianti (2013) dan Jaya (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung secara Parsial

Dari output regresi dapat dilihat bahwa Pajak Daerah mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 0,474 artinya jika Pajak Daerah mengalami pertambahan 1% maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,474% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Nilai signifikansi pajak daerah adalah sebesar 0,194 atau sekitar 19,4%. Nilai ini jauh melebihi taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Handayani dan Nuraina (2012), dan Sulistyowati (2011) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung secara Parsial

Dari output regresi dapat dilihat bahwa Retribusi Daerah mempunyai nilai koefisien yang negatif yaitu sebesar -1,719. Nilai signifikansi retribusi daerah adalah sebesar 0,662 atau sekitar 66,2%. Nilai ini jauh melebihi taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sulistyowati (2011) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal Kota Bandung secara Parsial

Dari output regresi dapat dilihat bahwa Lain-Lain PAD yang Sah mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 6,325. Nilai signifikansi Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar 0,004 atau sekitar 0,4%. Nilai ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keempat yaitu lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan deskriptif, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) Pajak Daerah mengalami peningkatan dari awal tahun bulan Januari hingga akhir tahun Desember tahun 2009-2013 sebesar 1787,06%; (b) Retribusi Daerah mengalami peningkatan peningkatan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar 297,46%; (c) Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan peningkatan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar 2577,05%.; (d) Persentase kenaikan Belanja Modal tidak dapat diketahui karena belanja modal memiliki belanja terkecil di bulan Januari-Februari sebesar Rp 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan belanja modal di bulan tersebut. Namun, jika dilihat dari data LRA menunjukkan bahwa belanja modal Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel PAD secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa: (a) Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung; (b) Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung; (d) Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.

Saran

Saran untuk pemerintah Kota Bandung: Pemerintah Kota Bandung sebaiknya meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah diluar pajak daerah, seperti retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah khususnya retribusi daerah agar pengalokasian anggaran retribusi daerah ke belanja modal juga dapat meningkat.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti hal yang sama, diharapkan dapat menggunakan sampel yang berbeda baik itu yang berada dipulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua dan dapat meneliti sumber-sumber penerimaan lainnya selain PAD yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. (2012). *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun*. Akuntansi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 Oktober 2012, 1-12.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi* Akuntansi Universitas Udayana Vol. 7 No. 1 April 2014, 79-91.
- Musfiquon, M. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Lengkap*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Oluwatobi, Stephen O., Ogunrinola, I Oluranti. (2011). *Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria*. **Journal of Sustainable Development** 4.3, Jun 2011: 72-80.
- Rachmat. (2011). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyowati, Diah. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi Undip 12 April 2011, 1-28.
- Sunjoyo, et al. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.